

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

VELY RONICHA

NPM : 1521020153

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Dinas Pariwisata Pesisir Barat)

Skripsi

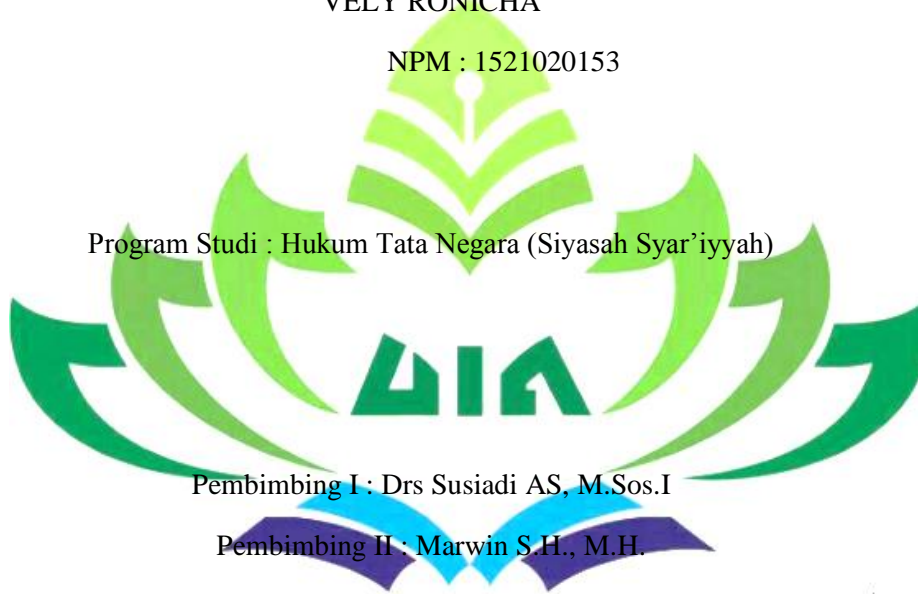
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

VELY RONICHA

NPM : 1521020153

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



Pembimbing I : Drs Susiadi AS, M.Sos.I

Pembimbing II : Marwin S.H., M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2019M

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menjadi kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat, apabila dapat di kelola secara maksimal. Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 dalam pengembangan pariwisata dapat dioptimalkan melalui sarana dan prasarana, promosi, pelatihan sumber daya manusia, sehingga membuka lapangan usaha baru yang berdampak pada pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah. namun potensi tersebut masih kurang diperhatikan pemerintah dan belum maksimalnya Dinas Pariwisata menjalankan tugas.

Pengembangan pariwisata yang tidak maksimal inilah menjadi dasar permasalahan dalam skripsi ini, hingga dirumuskan menjadi rumusan masalah 1. bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara se jelas mungkin tentang 1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat 2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat dalam Perspektif Hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap perkembangan pariwisata di Pesisir Barat maka dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pariwisata Pesisir Barat belum diterapkan secara maksimal karena hal tersebut disebabkan oleh disebabkan oleh akses jalan dan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang mengelola kurang memadai, kurangnya landasan hukum, masih memerlukan sosialisasi, Keterbatasan Anggaran Dana dari pemerintah, Banyaknya tempat wisata yang belum di kelola. Sedangkan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dalam perspektif hukum Islam boleh selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam. seperti bentuk pelayanan misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung Alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Vely Ronicha

NPM : 1521020153

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat)”**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2019
Penulis,



Vely Ronicha
NPM. 1521020153



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

Nama : Vely Ronicha
NPM : 1521020153
Jurusan : Siyasa Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
 Nomer 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk
 Pengembangan Pariwisata Perspektif Hukum Islam (Studi
 Dinas Pariwisata Pesisir Barat.**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
 Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS. M. Sos.I.
NIP.19580817199303 1002

Pembimbing II

Marvin S.H. M.H.
NIP.197501292000031001

Ketua Jurusan Siyasa Syar'

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat)”** disusun oleh

Nama: Vely ronicha NPM : 1521020153, Program Studi : Siyasah Syar' iyyah
(Hukum Tata Negara)

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Penguji Pendamping I: Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Penguji Pendamping II: Marwin S.H., M.H. (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

Artinya : Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha mendengar, Maha melihat.¹ (Q.S. Annisa : 58)



¹Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. An-nissa: 58.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur Ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa, terimakasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, berkat rahmat dan detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua saya Bak ku tercinta Pahroni dan Mak ku tercinta Ayu Fatimah yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik ku sejak dari kecil hingga dewasa seperti ini, terimakasih ku persembahkan atas jasa, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini. serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan ku. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adikku Aulia Rahman, Mutia Rahma, Fatardo Asyihari Sukur. semoga gelar ini bisa menjadi motivasi untuk kalian supaya bisa terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Keluarga besar Seni Budaya Islam (SBI) ,Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Acik keloq, abang che, bang bemol, bang bebes, bang pupung. senior ku yang tak pernah lelah mengajari dan menuntunku tentang arti sebuah perjuangan.
4. Sahabat-sahabat seangkatan (Siyasah 2015) dan saudara-saudaraku khususnya Siyasah A yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Suka Marga 17 mei 1997. Dengan Nama lengkap Vely Ronicha. Putri Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Pahroni dan Ayu Fatimah. Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SD Negri 1 Suka Baru Kec Way krui, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah Krui Lampung selesai pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui Lampung selesai pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof, KH. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki M. Si. Selaku ketua Jurusan Siyasah, dan Bapak. Hervin yokipradikta, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak. Drs, Susiadi AS. M.Sos.I. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.

Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
6. Sahabat-sahabat Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya Angkatan 2015 jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 2019

Vely Ronicha
1521020153

DAFTAR ISI

halaman

JUDUL	
ABSTRAK.....	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Pengertian Pariwisata.....	17
a. Dasar Hukum Pariwisata	19
b. Aturan Wisata	21
2. Pengertian Pariwisata menurut hukum Islam	25
a. Dasar hukum Pariwisata menurut Islam	31
b. Aturan wisata menurut Islam	37
B. Tinjauan Pustaka	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah singkat Kaupaten Pesisir Barat	45
B. Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat	46
C. Profil kantor dinas pariwisata Pesisir Barat	45
a. Visi, misi, pariwisata Pesisir Barat	48
b. Struktur organisasi ketenaga kerjaan di Dinas pariwisata	

pesisir barat.....	49
D. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	61
E. Faktor Pendukung Dan Penghambat pengembangan pariwisata daerah Pesisir Barat.....	
a. Pendukung	71
b. Penghambat	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengembangan daerah pariwisata kabupaten Pesisir Barat	81
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomer 03 tahun 2017 pengembangan pariwisata.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahan pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan bebarapa kata yang menjadi judul skripsi yang di maksud adalah **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGENBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam rangka penyempurnaan suatu program.²

2. Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.³

²Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Jakarta,1997), h.951.

³Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Kartika Surabaya, Cetakan pertama Juli 1997), h.241.

3. Rencana Induk Pengembangan

Rencana Induk Pengembangan adalah perencanaan secara menyeluruh, atau kegiatan usaha yang akan dilakukan di waktu tertentu.⁴

4. Pariwisata

Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang-orang asing dan perjalanannya itu tidak bertempat tinggal menetap.⁵ Jadi yang dimaksud dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata adalah melaksanakan kebijakan serta mengembangkan program yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Pesisir Barat.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat untuk semua yang ber agama Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat) adalah melaksanakan kebijakan yang dibentuk untuk perencanaan secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan untuk meneliti serta menganalisis. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Pesisir Barat.

⁴Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.112.

⁵Muljadi A. *Pariwisaa dan Perjalanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.8.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9.

B. Alasan memilih judul

Adapun Alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas dikarenakan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rerencanaan Induk Pengembangan Pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Alasan Subjektif

a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Perspektif Hukum Islam Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan Skripsi.

b. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang menulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syari Yyah.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan industri pariwisata di suatu negara atau daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan

dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan terhadap Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.⁷

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga semua daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata

⁷Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 172.

akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.⁸

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pengembangan pariwisata di daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Barat, salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.⁹

Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat berpotensi di Kabupaten Pesisir Barat namun sektor tersebut belum mendapat perhatian sungguh sungguh baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata adalah rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan dijadikan bahan arahan/panduan dalam mengembangkan program-program pembangunan pariwisata.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Selain potensi dan jenis pariwisata yang beragam,

⁸Sunawan, *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997, h. 67.

⁹Siagian, Sondang, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 19.

secara geografis letak Kabupaten Pesisir Barat berada pada jalur pantura yang menghubungkan dua kota besar yaitu kota Agung dan Bengkulu serta di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas terdiri dari kawasan unggulan, kawasan andalan, kawasan pembangunan dan kawasan potensial.¹⁰

Kawasan pembangunan yang masuk dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat adalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan pengembangan potensi wisata dan sekaligus konservasi perlindungan Alam Pesisir. namun pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Tidak mengherankan apabila sarana prasarana penunjang di lokasi wisata masih memprihatinkan. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi pembangunan kepariwisataan itu sendiri dalam perkembangannya masih belum optimal. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan di sektor ini belum dilakukan secara profesional.¹¹

Berbagai permasalahan seperti pembangunan industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran pariwisata menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan pariwisata.¹²

Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pembangunan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat

¹⁰Yoeti Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta : Angkasa Bandung, 1982), h,181.

¹¹Sunaryo Bambang, *Kebijakan Pembangunan Dinasti Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (YogJakarta: Penerbit Gava Media, 2013), h, 132.

¹²Suwarjono, Muhammad, *Manajemen Strategis. Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta : YKPN, 2000), h,59.

potensi sumber daya alam di Kabupaten Pesisir Barat juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain di Indonesia yang melimpah.¹³ Dengan mengembangkan potensi pariwisata masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing).

Selain regulasi Otonomi daerah dan peraturan lainnya, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki termasuk potensi pariwisata, adalah dari kesiapan daerah itu sendiri untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat perlu mengimplementasikan pelimpahan tugas dan wewenang dalam otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memberikan arah pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan berbagai faktor keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selain itu, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat menjadi bagian integral dari rencana induk

¹³Suryati, *lingkungan Industri Pariwisata*, 1995, h, 23.

pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sehingga terjadi pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program yang telah di rancang dalam rancangan induk pengembangan pariwisata daerah (RIPKD) Pesisir Barat. Maka diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan kendala yang dirasakan dalam Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Pesisir Barat, dinas pariwisata baik kegiatan langsung maupun tidak langsung. Hasil penelusuran diawal lapangan maka didapatkan permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat oleh Dinas pariwisata kegiatan wisata yang berlangsung selama ini kurang terpadu secara sektoral antara pelaku (masyarakat dan pemerintah), kurangnya insftruktur, kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan potensi wisata tidak terealisasi kedalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan penduduk lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Persepektif Hukum Islam”.

D. Fokus Penelitian

Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih Fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu membatasi variabelnya, yaitu hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan pariwisata Dalam mengembangkan daerah pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Pelaksanaan Perda Rencana Induk Pengembangan daerah pariwisata karena kedua variabel ini paling signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan peneliti

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2017.

- b. untuk mengetahui Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum tatanegara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai kesejahteraan masyarakat yang adil hak bagi warga negara Indonesia.

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketata negaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan Akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya

- b. untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), Dalam hal ini data yang diperoleh dari dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik, Cetakan ke 3, 2011), h,106..

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹⁵ Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah: Kepala Dinas Pariwisata (1 orang), Kasubag keuangan (1 orang), kabid pengembangan SDM pariwisata (1 orang), Kabid Pemasaran Pariwisata (1 orang).

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.¹⁶ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.¹⁷

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi menjadi 2 yaitu *probabilitas sampling* dan *non probabilitas*

¹⁵Serdermayati, Hayati, Syarifudin, *Metode Penelitian*, (Bandung: Manjang Maju, 2002), h,34.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h,173-174.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan E&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), h, 118.

sampling.¹⁸ sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan *non probabilitas sampling* dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *accidental/ sampling*. *Accidental samling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung diwawancara.¹⁹ sampel yang akan digunakan dipenelitian ini antara lain : Kepala Dinas Pariwisata (1 orang), Kasubag keuangan (1 orang), kapid pengembangan SDM pariwisata (1 orang), kapid pemasaran pariwisata (1 orang).

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode *interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para pihak yang bersangkutan. Dan para tersebut adalah Kepala Dinas dan anggota-anggota didinas Pariwisata Kabupaten Pesisr Barat.²⁰

¹⁸*Ibid*, h, 218.

¹⁹ Amiriddin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke -6*(Jakarta: Raja Wali Pres 2012), h,107.

²⁰*Ibid*, h, 126.

- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.²¹

5. Metode pengolahan data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau Dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya)
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²²
- d. Sistemetisasi data (*systematizing*) yaitu pemenpatan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

63. ²¹Cholid Naruko, Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007) ,h,

²² Noer Saleh, Musnet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung,1989), h.16.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.²³



²³Suharsimin Arikunto, *Op, Cit*, h, 29.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembangan Pariwisata Menurut Islam

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau berpergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut definisi yang luas seperti yang dikatakan oleh Spillane.²⁴ Pengertian pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk asing didalam atau diluar Suatu Negara, Kota, atau Wilayah tertentu.

Menurut definisi yang lebih luas, Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukanperorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.²⁵

Pengertian lain yang menyebutkan bahwa Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain atau keluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai

²⁴Spillane J, *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h, 5.

²⁵Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, “*Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No 4, h. 137.

kepentingan, baik karena kepentingan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Politik Agama, Kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman maupun untuk belajar. Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan atau bukan untuk kegiatan menghasilkan upah.²⁶

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan menjadi bagian dari perekonomian global. Berlangsungnya revolusi 3T, *transport, telecommunication, tourism*, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata telah menjadi salah satu kekuatan yang mampu mempercepat penyatuan dunia dalam integrasi ekonomi dan pergerakan manusia lintas daerah dan bahkan lintas negara.²⁷

Menurut Yoeti, pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.

²⁷Soedarsono, Muchammad Nurif, Windiani, “ Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places”, *Jurnal Sosial Humainora*, Vol. 7, No. 2 (November 2014), h. 137.

3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.²⁸

a. Dasar Hukum Pariwisata

Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (8), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.²⁹

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta Negara akan

²⁸Yoeti, Oka A, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Pradaya Pratama, 2008), h, 8.

²⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017.

mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.³⁰

Potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban.

Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Kepariwisata ini hanya menekankan pada perlindungan terhadap objek wisata itu sendiri. Hal ini tampak keseriusan pemberian sanksi pada pasal 64 yang mengatur bahwa bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sementara itu, pelanggaran hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis.

pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha.³¹ Pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk

³⁰Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009.

³¹Sarisiti dan Muhammad Taufik, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Objek Wisata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2012), h. 32.

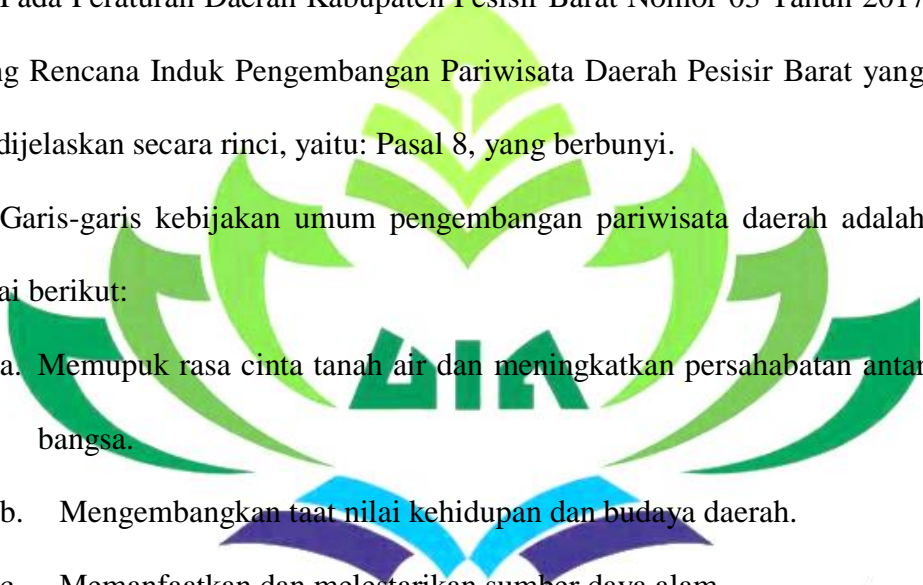
mewujudkan keterpaduan dalam menggunakan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.³²

b. Aturan Pariwisata

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Pesisir Barat yang telah dijelaskan secara rinci, yaitu: Pasal 8, yang berbunyi.

Garis-garis kebijakan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- 
- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
 - b. Mengembangkan taat nilai kehidupan dan budaya daerah.
 - c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam.
 - d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

³²Pitana, I Gede Putu, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h 56.

Pasal 9:

Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktikan dan dipelihara.
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- e. Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia.

- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Pasal 10:

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata.
- b. Penetapan zona pengembangan pariwisata.
- c. Pengembangan usaha pariwisata.
- d. Pengembangan sumber daya manusia.
- e. Pengembangan kelembagaan.
- f. Pengembangan fasilitas penunjang.
- g. Pengelolaan lingkungan.
- h. Pengembangan pasar pariwisata.

Pasal 12:

Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata:

- (1) Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 [empat) zona pengembangan.
- (2) Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat adalah sebagai berikut:
 - a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia
 - b. Zona 2 Kawasan Bengkunt Belimbing dan Pulau Betuah
 - c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang
 - d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan.

(3) Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No 9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II Pasal 3 disebutkan bahwa “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara”.

Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata Pasal 11 yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- 1) Aksesibilitas
- 2) Amenitas/ fasilitas
- 3) *Ancillary*/kelembagaan daya tarik wisata
- 4) Kesiapan masyarakat
- 5) Era/*trend* yang berkembang.

2. Pengertian Pariwisata Menurut Hukum Islam

Pariwisata Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al-Siyahah, al-Rahlah, dan al- Safar*”³³ atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “*tourism*”³⁴ Secara definisi berarti suatu aktifitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri maupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.³⁵

³³Rohi Baalbaki, *Al Muwrid A Modren Aric English Dictionary, Dar Al Iim*, (Beirut: Almalayin, 1995),h. 569.

³⁴John M.Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010),h.156.

³⁵Kaelani Hd *Pariwisata dalam Perspektif Islam*. (Online) tersedia di:[www.digilib.ui.edu/Penelitian/Pariwisata dalam Perspektif Islam](http://www.digilib.ui.edu/Penelitian/Pariwisata%20dalam%20Perspektif%20Islam),(15 November 2018).

Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau wisata dalam kata sensekerta atau dalam bahasa Inggris terkenal dengan trevel dan safar dalam bahasa arab. Jika di kaji lebih mendalam dari istilah itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak semua makhluk yang di jagat raya ini tidak akan terlepas dari perjalanan, termasuk makhluk terkecil semut sekalipun, perbedaannya hanya dari motif perjalan itu sendiri, jika semut melakukan perjalanan adalah hanya untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai macam motif perjalan, ada yang motifnya untuk rekreasi (menikmati objek dan daya tarik wisata, baik wisata alam budaya) olahraga, mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan pendidikan dan sebagainya.

Definisi pariwisata Islam merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai nilai Islam. Sehingga masyarakat muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa.³⁶

Pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan

³⁶Ardi Stefan, *Pariwisata Menurut Agama Islam* (Online), tersedia di: <https://koleksi tugasku.blogspot.com/2018/26/pariwisata-menurut-agama-islam,hhtml>, (26 agustus 2019).

sosial ekonomi. Di dalam muamalah, pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa didasarkan kepada makna akidah yang disebut *naqashidal syari'ah*. Menurut *Ibnu al-Qaiyim al-Jauziah syariah* senantiasa didasarkan kepada *maqashidsyar i* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik didunia maupun akhirat.³⁷ Di samping tentu juga harus menyeimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), dimana menghindari keburukan jauh lebih baik dari pada mengambil kebaikan.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

دَرُّ أَلْمَقَاسِ دِ مُقَدِّمٌ عَلَى لُبِّ الْمَصْرِحِ

Artinya: “Menghindari (timbulnya) keburukan (harus) diutamakan dari mengambilkebaikan”.³⁸

Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik dari pada yang baik harus pula diutamakan. Di dalam kaitan ini maka bila pengelolaan sebuah dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Islam adalah positif Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan

³⁷Ibnu Qaiyum, *Al-Jauzi, I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbi Al-Alamin*, (Dar Jail, Baerut, 1973 M), hal 25.

³⁸Syekh Muhammad Zarga', *Syarah al- qawaid al-Fiqhiyah*, cet II, (Dar Qalam, Damascus, 1987M), h.205.

wisata itu. Didalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama dari pada mengambil kebaikan (maslahat).

Oleh karena itu, pandangan Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak.

Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsip Islam) apabila:

1. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan manajemen modern dengan konsep-konsep ajaran Islam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Tujuan di arahkan untuk memperkuat iman dan memupuk ahlak.
2. Penyelenggaraannya tidak mempraktekan suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral .

3. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya murah dan halal untuk di perhatikan .
4. Sarana dan prasarana pariwisata dapat di mafaatkan sebagai media dakwah.
5. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak mengubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.³⁹

Oleh karena itu menjadikan pariwisata seagai sebuah usaha peningkat ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah di perolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal haram, maka semua komponen mulai maka semua kamponen mulai dari pihak pemerintah hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain meliputi:

- a. Aktifitas bisnis (Muamalah Madhiyah) dalam mengelola objek pariwisata tidak di benarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (*maisir*), ria, dagangan dan bisnis yang dilarang lainnya.
- b. Bahan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wistawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram halalnya.

- c. Objek wisata yang di tawarkan adalah objek yang oleh dan layak untuk disaksikan.
- d. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan seperti peringatan atau himbauan yang relegius dan tempat tempat tertentu atau membuat brosur brosur yang berisi penjelasan yang bernuasa agama.⁴⁰

Disamping itu pariwisata juga berperan di dalam pengembangan semangat. Rasa dan kesadaran keberagamaan (*religiousness*) manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disinggung di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang melakukan prosesi dan safari suci Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kembali ke makkah. Ziarah ke kota dan Masjid Nabawi di Madinah dan tempat tempat bersejarah lainnya di sekitar mekkah dan Madinah. Perkunjungan ke tempat tempat bersejarah Islam, bersejarah Islam, berziarah ke makam-makam para tokoh Islam yang mungkin berada di tempat yang jauh, yang mungkin berada di sebuah negara di luar negaranya. Dengan ditepatkannya tuntutan pemenuhan rukun yakni kewajiban melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci Mekkah bagi kaum muslim yang telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan al-Qur'an ibadah merupakan berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: *Wakuf, Mait, Thawaf, Sa'i* dan

⁴⁰*Ibid*, h.40

amalan lainya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Swt dan mengharapkan ridho-Nya.⁴¹

Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh Islam adalah pariwisata yang berhubungan dengan spiritualitas, berziarah, dan perkunjungan ketempat tempat bersejarah Islam, perkunjungan tentang kebesaran ciptaan tuhan, seperti pemandangan Alam, Gunung Berapi, Danau dan seajatnya. Islam dan kaum muslim resisten terhadap segala jenis priwisata yang bertentangan dengan pelanggaran etika, dan morelitas Islam seperti misalnya : pariwisata Pantai yang mengarah kepada mempertontonkan pakaian mini dan lekuk badan, pariwisata cafe yang memajikan minuman beralkohol yang semuanya oleh etika Islam.⁴² Umat manusia, tidak datang begitu saja, namun Islam sebagai agama yang ada datang untuk memberikan kemaslahatan ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu, tentu ada jejak sejarahnya. Islam bukan agama buatan manusia, namun adalah kalam Allah yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril untuk kebahagiaan dunia dan akhirat semua aturan, tuntunan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan pedoman inti dalam menapaki kehidupan sebab itulah, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat ada tuntunan dan tuntunan yang harus dijalankan. Dalam rangka menjalankan ajaran

⁴¹Abdul Djamil, *Tuntunan Manasik Haji dan Umarah*,(Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Peneylangaraan Haji dan Umrah, 2016),h,189.

⁴²Gusti Bagus Rai Utama ,*Pariwisata dalam Pandangan Islam dan Muslim* (Online) tersedia di: <https://tourismali.wordpress.com/> 2010/11/09/Pariwisata-dalam-pandangan-islam-dan-muslim.(26 agustus 2019).

Islam, maka bagi pemeluknya berupaya hukum Islam bisa berjalan dan bahkan menjadi budaya suatu negara.⁴³

a. Dasar Hukum Pariwisata Menurut Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berpergian, bahkan salah satu ulama Islam yang cukup terkenal bernama Ibnu Batutah, adalah salah satu explorer Ukung asal Maroko yang di kenal baik didunia barat maupun Islam. dalam bahasa Islam kita mengenal istilah hijrah, berpindahnya seseorang (baik secara temporer maupun permanen) dari suatu tempat ke tempat yang lainya yang lebih baik, karena dalam hijrah setidaknya ada tiga manfaat. Mendapatkan Ilmu yang baru, mendapatkan saudara yang baru dan terbukanya pinturezeki. karena hakikatnya Allah SWT sengaja telah menciptakan manusia dengan beragam suku dan budaya untuk saling mengenal, memahami budaya masing-masing untuk kemudian memuka pikiranya untuk kian bertakwa kepadanya. Dalam surat al-Ankabut ayat 20 Allah SWT berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “katakanlah,berjalanlah dimuka bumi dari permulaanya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”(Q.S Al Ankabut (29): 20).

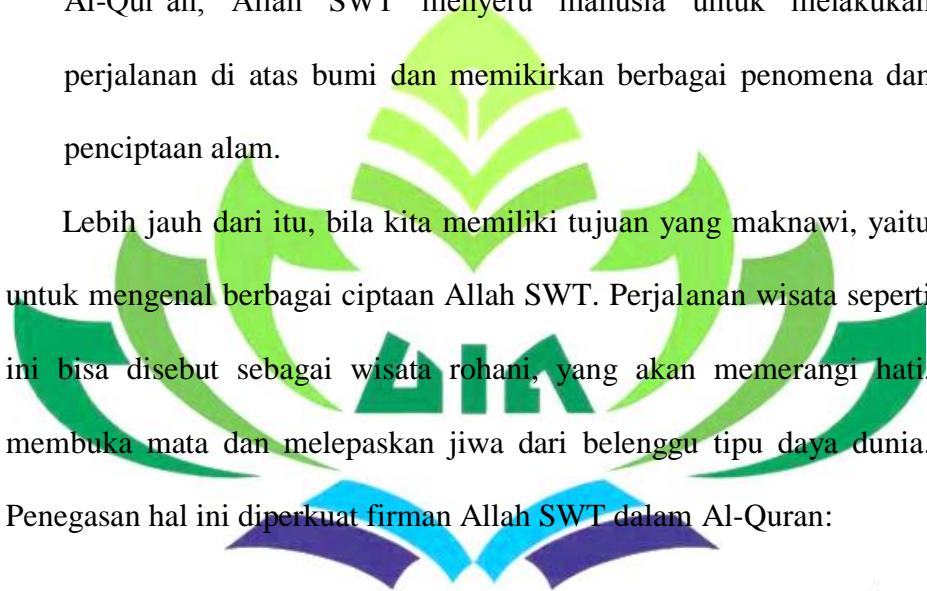
⁴³Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al’adalah*, Vol. 10, No. 2, (2012),h.467.

Dalam surat diatas Allah SWT juga mengisyaratkan untuk berjalan dimuka bumi sebagai lahan yang telah Allah harapkan bagi manusia untuk di jelajahi, dan di pelajari untuk kemudian di ambil hikmahnya. Dan setiap non-muslim jadi sadar dengan keagungan tuhan, lebih mengenal Islam sebagai agama yang damai dan rahmatanlilalamin. Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan tujuan berwisata antara tujuan tujuan tersebut adalah:

a. Menegal Sang Pencipta dan Mengingatn Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan utama, adalah untuk mengenal Tuhan.dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah SWT menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai penomena dan penciptaan alam.

Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah SWT. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan memerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Penegasan hal ini diperkuat firman Allah SWT dalam Al-Quran:



أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan dimuka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka(sendiri) dan telah mengelola bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah datang kepada mereka rosul-rosul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.maka Alloh sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka,akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri”. (Q.S Ar Rum (30):9)

Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengali potensi wisata Sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peningkatan lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

a) Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah.

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga dan berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu yang di anjurkan. Beragai ayat dari riwayat Islam menunjukan pujian kepada usaha perekonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran:

أَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”.

(Q.S Al-Jumu'ah (62):10)

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin melakukan perjalanan keberbagai penjurur dunia untuk berdagang mencari penghasilan, yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar keberbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat di kembangkan melalui program Pemerintahan Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

a) Menambah Wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negri yang jauh. Salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya peradapan Islam adalah perjalanan pariwisata.

b) Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari Dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat.

Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan ketenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan tuhan yang indah, seperti Gunung-Gunung yang menjulang tinggi, Sungai-Sungai yang mengalir deras, Mata Air yang jernih, atau Hutan-Hutan yang hijau dan Laut yang penuh Ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan Iman pada sang Khaliq.⁴⁴

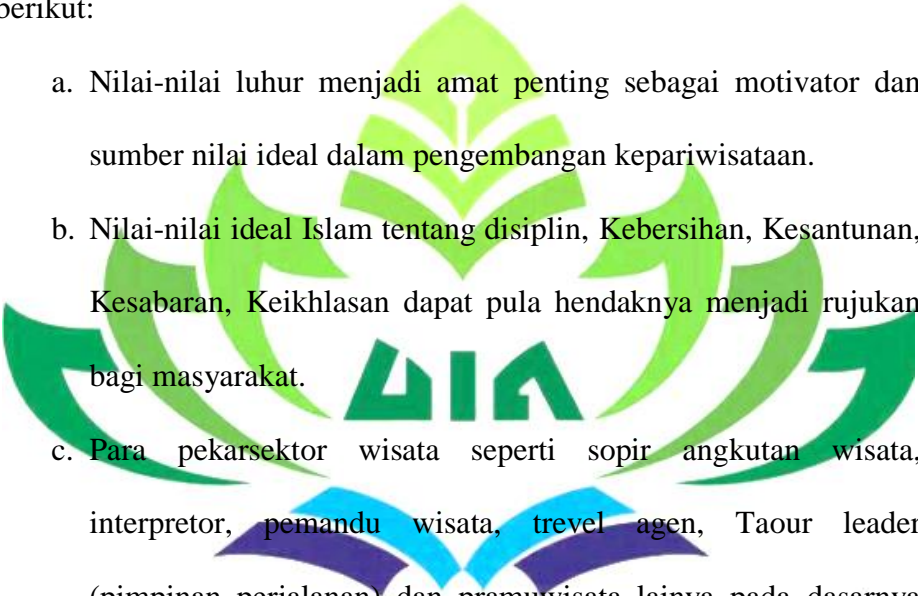
Sebagai mana dijelaskan diatas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan jaran Islam. Sektor Pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang didalamnya.

Sebagai sebuah mu'amalah yang mubah (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana

⁴⁴Fajar Santoso, *Pariwisata dalam pandangan Islam (Online)*, tersedia di: www.tabloid_info.sumenep.go.id/artikel/pariwisata dalam pandangan Isam, Fajar Santoso dan www.ranah-minang.com/artikel/potensi dan permasalahan dalamkebiakan industri pariwisata, (27 angustus 2019)

yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keseimbangan dan ketaqwaan serta tercapai nilai-nilai kehidupan yang luhuran tinggi.

Untuk maksud tersebut maka diperlukan perhatian yang proposional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 
- a. Nilai-nilai luhur menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan.
 - b. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, Kebersihan, Kesantunan, Kesabaran, Keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat.
 - c. Para pekarasektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, trevel agen, Taour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terdapat pengembangan wisata yang ideal.
 - d. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya.

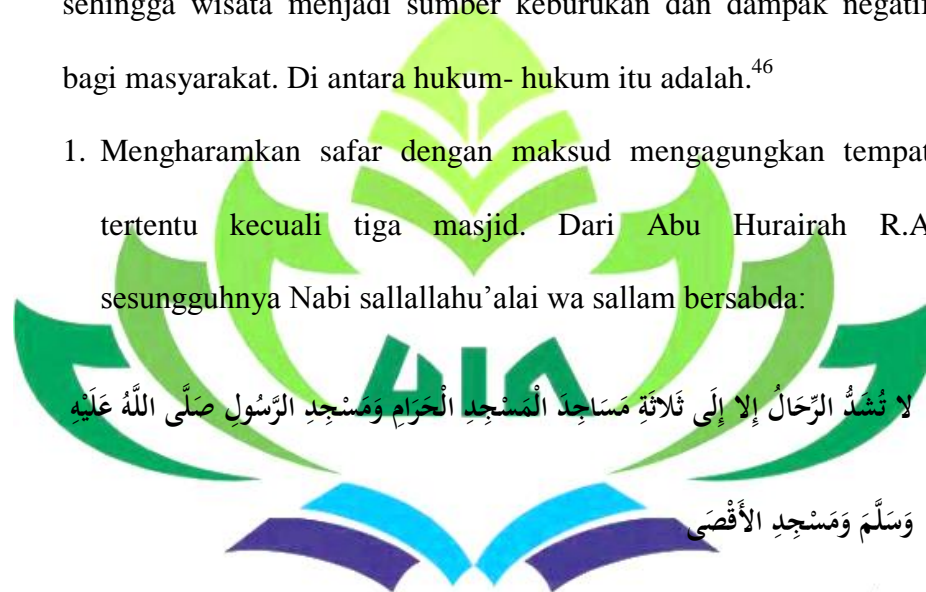
e. Fasilitas, Perlengkapan, Peralatan, Akomodasi Dan Konsumsi.

Pada setiap tempat objek wisata hendaknya disamping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat Ibadah serta tersedia air untuk berwudu yang bersih dan memadai.⁴⁵

b. Aturan wisata menurut Islam

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum- hukum itu adalah.⁴⁶

1. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya Nabi sallallahu'alai wa sallam bersabda:



Artinya: *Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah sallallahu'alaihi wa saalam dan Masjidil Aqsha (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan wisata Religi ke selain tiga Masjid, seperti ajaran

⁴⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

⁴⁶Tohir Bawazir,

mengajak wisata Ziarah Kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang digunakan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membiasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengunjungan pada tempat tertentu dengan menunaikan Ibadah didalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tadi. Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga tempat ini.

Hal ini bukan berarti dilarang mengunjungi Masjid-Masjid yang ada di negara Muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kalau ada tujuan lain dalam Safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke Masjid, maka tidak mengapa. Bahkan terkadang diharuskan menunaikan Shalat Jum'at dan Shalat berjemaah. Yang keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat Suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau Patung Budha atau lainnya yang serupa. Perjalanan jauh atau Safar yang dilarang ialah Safar untuk mencari berkah atau Ibadah di tempat tertentu, yang semata-mata karena tempat tersebut.

Semua perjalanan yang dilakukan dengan niat tersebut adalah haram, kembali ke masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsha. Sedangkan safar yang dilakukan tanpa ibadah di tempat tertentu tidaklah termasuk dalam hadits ini, akan tetapi

hukumannya tergantung tujuan safar itu sendiri, sebab pada dasarnya safar adalah sesuatu yang di bolehkan dalam agama. Pariwisata dengan demikian mempunyai peranan yang amat luas didalam kehidupan manusia.

Akan tetapi wisata yang menyimpang dari norma yang ideal haruslah disingkirkan seperti wisata yang hanya menekankan kepada Sun, Sand, Sea, Smile And Sex (Matahari, Pasir Pantai, dan Seks) wisata hiburan yang mengarah kepada eksplorasi dan eksploitasi seks dan wanita dan pria yang mengutamakan kesenangan fisik yang rendah bersifat hedonistik dan erotik untuk kepuasan lahiriah dan naluriah hewaniah, inilah yang menjadi malapetaka. Bila jenis wisata ini berkembang, maka pada ujungnya akan menumbuhkan penyalahgunaan obat terlarang dan bahkan menjadi sarang berkembang HIV dan Aids.

2. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seseorang Muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan ahlak seorang muslim, akibat tecampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan ahlak. Khususnya apa bila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang Cuma sekedar bersenang-senang atau rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-nya, sehingga tidak perlu pergi kenegri negara orang kafir. Syekh Shaleh Al-Fauzan Hafizhullah berkata:

“Tidak boleh safar ke negri kafir, karena ada khawatiran terhadap akidah, akhlak, akibat tercampur dan menetap di tengah orang kafir diantara mereka. Akan tetapi kalau ada peluang mendesak dan tujuan yang benar untuk safar kenegara mereka seperti safar untuk berobat yang tidak ada dinegaranya atau safar untuk belajar yang tidak dapatkan di negara muslim atau safar untuk berdagang, semuanya ini adalah tujuan yang benar, maka di bolehkan safar kenegara kafir dengan syarat menjaga syiar keislaman memungkinkan melaksanakan agamanya dinegri mereka”.

Hendaklah seperlunya, lalu kembali ke negri Islam. Adapun kalau safarnya hanya untuk wisata, karena tidak dibolehkan. karena seorang muslim tidak membutuhkan hal itu serta tidak ada manfaat yang sama atau yang lebih kuat diandingkan dengan bahaya dan kerusakan pada agama dan keyakinan.

3. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam

melarang wisata ketempat-tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti dipinggir pantai yang bebas dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan Bid'ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka ingin terjermus (kedalamnya) dan ingin duduk dengan yang melakukan itu.

Para ulama dalam Al-Lajnah ad-Daimah, mengatakan : “Tidak diperkenankan berpergian ditempat-tempat kerusakan untuk berwisata”. Karena hal itu mengundang bahaya kepada agama dan akhlak. Karena ajaran Islam datang untuk menutup peluang yang merumuskan kepada keburukan. Bagaimana dengan wisata yang mengantarkan kemaksiatan dan perilaku tercela, lalu kita ikut mengatur, mendukung dan menganjurkannya? Para ulama Al-Lajnah Ad-Daimah juga berkata: “Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemungkarandan mengajak kesana, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahnya”. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik dari itu.

4. Tidak boleh juga wanita berpergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah tanpa mahram. Bagaimana dengan safar untuk wisata yang didalamnya banyak tasahul (mempermudah masalah) dan campur baur yang diharamkan.
5. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir dinegara Islam, asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya dinegara Islam harus terikat

dan dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaanya.

Dimanapun dilarang mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh orang Islam dengan batil. Mereka juga tidak boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju. Mereka bukan sebagai mata-mata atau spionase untuk negaranya. Yang terakhir tidak diperbolehkan berkunjung kedua tempat suci: Mekkah dan Madinah.⁴⁷



⁴⁷Dewie Upw,*Pariwisata Dalam Agama Islam,(Online)*, tersedia di:<http://dewieupwla.logspot.co/2014/12/pariwisata-dalam-agama-islam.html>.Diakses pada (28 Desember 2018).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penerapan penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan .

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Afni (2015) yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.⁴⁸

Skripsi kedua yang berjudul: “*Upaya pemerintah kota singkawang dalam mengembangkan obyek wisata*” karya Mardianto Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. skripsi ini mengkaji perlunya menggali potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan secara serius guna mendatangkan hasil yang positif bagi pembangunan sarana dan prasarana, dan meningkatkan koordinasi dengan dinas lain serta pihak swasta.⁴⁹

Skripsi yang berjudul “*Implementasi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Retriusin Pariwisata Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2006*” karya

⁴⁸ Ika Nur Afni, “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo*” Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yoyakarta, 2013.

⁴⁹ Mardianto “*Upaya Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mengembangkan Obyek Wisata*” Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2007.

Lenni Rina Kurnia Skripsi mengkaji mengenai strategi-strategi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengangkat pendapatan Asli Daerah dari penerimaan retribusi pariwisata.⁵⁰ Jadi dari tugas skripsi saya tersebut dengan skripsi ini tidak sama walaupun sama sama membahas tentang pariwisata.



⁵⁰ Lenni Rina Kurnia *"Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Retribusi Pariwisata Dalam Rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2006"* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Djamil. *Tuntunan manasik haji dan Umarah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah, 2016)

Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar fiqh*, (Jakarta: Prenada media, 2003).

Cholid Naruko, Abu Achadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi aksara 2007).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, (Dar Jail, Baerut, 1973 M).

Ika Nur Afni, *"Implementasi Keijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo"* Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013.

John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010)

Kaelani. Hd *Pariwisata dalam Perspektif Islam*. (Online) tersedia di: [www.digilib.ui.edu/ Penelitian/ Pariwisata dalam Perspektif Islam](http://www.digilib.ui.edu/Penelitian/Pariwisata%20dalam%20Perspektif%20Islam), (15 November 2018).

Lenni Rina Kunia *"Implementasi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Retribusi Pariwisata Dalam Rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2006"* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dn Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Murdianto *"Upaya Pemerintah Singkawang Dalam Mengembangkan Obyek Wisata"* Kota Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2007.

Pitana, I Gede Putu, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005).

Rohi Baalbaki, *Al Muwrid A Modren Aric English Dictionary*, dar al Iim, (Beirut: Almalayin, 1995)

Sunawan, *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997

Suryati, *lingkungan Industri Pariwisata*.

Suharsimin Arikunto, op, cit

Spillane J, *Pariwisata Indonesia Sejarah Dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).

Soedarsono, Muchammad Nurif, Windiani, “ *Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places*”, *Jurnal Sosial Humainora*, Vol. 7, No. 2 (November 2014)

Syekh Muhammad Zarga', *Syarah al- qawaid al-Fiqhiyah*, cet II, (Dar Qalam, Damascus, 1987M)

Tohir Bawazir, *Op.Cit, h.63*

Yoeti, Oka, A, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Pradaya Pratama, 2008)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta Grafik Grafik, Cetakan ke 3, 2011)

JURNAL

Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Al'adalah*, Vol. 10, No. 2, (2012).

Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, “*Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No 4.

Sarisiti dan Muhammad Taufik, “*Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Objek Wisata*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2012)

WAWANCARA

Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 15 September 2019.

Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 18 September 2019.

Hasil wawancara dengan Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 16 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan Leo Davit, Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Barat, tanggal 17 September 2019.

Hasil wawancara dengan Mirton setiawan, kabid pengembangan SDM pariwisata, 17 September 2019.

Hasil wawancara dengan Ermayati, kabid pemasaran pariwisata, 17 September 2019.

ON-LINE

Ardi Stefan, *Pariwisata menurut Agama Islam* (Online), tersedia di: <https://koleksi.tugasku.blogspot.com/2018/26/pariwisata-menurut-agama-islam.html>, (26 agustus 2019).

Dewie Upw, *Pariwisata Dalam Agama Islam*, (Online), tersedia di: <http://dewieupw1a.blogspot.co/2014/12/pariwisata-dalam-agama-islam.html>. Diakses pada (28 Desember 2018).

Fajar. Santoso, *Pariwisata dalam pandangan Islam* (Online), tersedia di: www.tabloid.info.sumenef.go.id/artikel/pariwisata dalam pandangan Islam, Fajar Santoso dan www.ranah-minang.com/artikel/potensi dan permasalahan dalamkebiakann industri pariwisata, (27 angustus 2019).

Gusti Bagus Rai Utama, *Pariwisata dalam Pandangan Islam dan Muslim* (Online) tersedia di: <https://tourismali.wordpress.com/2010/11/09/Pariwisata-dalam-pandangan-islam-dan-muslim>. (26 agustus 2019).

